

Katalog : 4102002.3307

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**
Statistics of Wonosobo Regency

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO 2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO 2019

ISBN: -

No. Publikasi: 33070.2032

Katalog: 4102002.3307

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 59 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Ilustrasi Kover:

Anak Sekolah

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Wonosobo

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab Umum:

Drs. Wazirrudin

Penyunting:

Novi Hardianto, S.S.T.

Penulis:

Agung Bintoro Aji, S.S.T.

Pengolah Data:

Agung Bintoro Aji, S.S.T.

Gambar Kulit:

Agung Bintoro Aji, S.S.T.

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejalan hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo berupaya untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo secara berkesinambungan. Metode penyajian dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif sederhana menggunakan pendekatan tabel, grafik, dan *scatterplot* untuk mempermudah pengguna dalam memahami perkembangan capaian IPM beserta indikator penyusunnya. Dengan adanya publikasi ini diharapkan pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Harapan kami publikasi yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo 2019” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Wonosobo, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wonosobo



Drs. Wazirrudin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Infografis	xii
Bab 1	
Pendahuluan	1
Bab 2	
Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya	5
2.1 Konsep Dasar Pembangunan	6
2.2 Konsep Dasar Pembangunan Manusia	7
2.3 Pengukuran Pembangunan Manusia	9
2.4 Metodologi Pengukuran IPM	12
2.5 Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	16

Bab 3		
Potret Pembangunan Manusia		
di Kabupaten Wonosobo		17
3.1	Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo	18
3.2	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	22
3.3	Dimensi Pengetahuan	26
3.3.1	Harapan Lama Sekolah	26
3.3.2	Rata-rata Lama Sekolah	28
3.4	Dimensi Standar Hidup Layak	31
Bab 4		
Capaian dan Tantangan		34
4.1	Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	36
4.2	Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	44
4.3	Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	55

DAFTAR TABEL

3.1	Nilai Komponen IPM Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019	21
4.1	APS Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	39
4.2	APM Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	40
4.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	54

DAFTAR GAMBAR

2.1	Perkembangan Penghitungan IPM	11
3.1	IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2012-2019	19
3.2	Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2013-2019	20
3.3	Komponen Penghitungan IPM	23
3.4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2012-2019	24
3.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019	25
3.6	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2012-2019	27
3.7	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019	28
3.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2012-2019	29
3.9	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019	30
3.10	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan per tahun di Kabupaten Wonosobo, 2012-2019	32
3.11	Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun untuk Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional	33
4.1	Rasio Murid Guru Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	42
4.2	Rasio Murid Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	43

4.3	Rasio Guru Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	44
4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	46
4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Wonosobo, 2019	47
4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	49
4.7	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	51
4.8	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019	53
4.9	Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo, 2014-2019	56
4.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, 2014-2019	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsep pembangunan manusia mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Sejalan konsep tersebut, UNDP dalam *Human Development Report* (2016) lebih memaknai pembangunan manusia sebagai segala sesuatu yang terkait dengan manusia, kebebasannya dalam memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuannya.

UNDP menyatakan bahwa konsep pembangunan manusia pada dasarnya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya terangkum dalam suatu indeks komposit, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diumumkan secara resmi oleh UNDP pada 1990.

Sampai dengan 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. Pada 2010, UNDP melakukan penyempurnaan dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama, namun menggunakan indikator dan metode agregasi yang berbeda. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2012—2019, IPM Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 64,18 menjadi 68,27. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata tumbuh

sebesar 0,89 persen per tahun. Pertumbuhan ini melampaui laju pertumbuhan IPM pada tingkat nasional (0,87 persen) namun masih lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi (0,93 persen).

Meskipun selama kurun waktu tersebut IPM Kabupaten Wonosobo menunjukkan pertumbuhan yang bagus, namun status pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo berstatus “sedang” dan belum berubah sejak 2010. Sementara itu, jika dilihat menurut keterbandingan antarwilayah se-Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-31. Sepanjang tahun 2012—2019 itu pula, capaian IPM Kabupaten Wonosobo berada di bawah capaian IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kemajuan pembangunan di Jawa Tengah pada umumnya.

Pada 2019, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Wonosobo sebesar 71,60 tahun, meningkat 0,97 poin dibandingkan kondisi 2012. Sementara itu, selama kurun waktu 2012—2019, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren yang terus meningkat. Sampai dengan 2019, HLS Kabupaten Wonosobo mencapai 11,74 tahun. Angka ini meningkat 0,91 poin jika dibandingkan kondisi 2012.

Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo naik 0,86 poin dibandingkan kondisi RLS 7 tahun yang lalu, menjadi 6,76 tahun. Seiring dengan peningkatan indikator-indikator sebelumnya, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo, yang diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga mengalami peningkatan. Tercatat pengeluaran per kapita per tahun di Kabupaten Wonosobo pada 2019, adalah sebesar 10,87 juta rupiah, naik 15,60 persen dibandingkan 2012, yang hanya 9,40 juta rupiah.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019

68,27





BAB 1

PENDAHULUAN

<https://wonosobokab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan memiliki makna yang sangat luas dan senantiasa berkembang. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Alat ukur yang sering digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional/ regional bruto (*Gross National Product* disingkat *GNP*) dan pertumbuhan pendapatan nasional/ regional perkapita (*income per capita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang atau bahkan terbelakang. Pertumbuhan yang tinggi juga diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Pada masa itu, banyak negara yang mengambil kebijakan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan bagaimana mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan sering kali menjadi prioritas berikutnya.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kompleksnya persoalan yang melingkupinya, maka makna pembangunan semakin berkembang dan cakupannya juga senantiasa mengalami perluasan. Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatanan sosial atau masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional,

penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Bank Dunia dalam salah satu publikasi yang dirilis menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama di negara-negara miskin dan terbelakang. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun masih ada syarat-syarat lainnya yang juga harus diperjuangkan yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001). Untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu diperlukan sebuah indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang ditempuh oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* adalah merilis *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (*Human Development Reports, 1990*).

Sejak saat itu, angka IPM telah menjadi salah satu alat ukur kinerja pembangunan manusia di wilayah atau negara sehingga dapat dijadikan salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu wilayah atau negara tersebut.

IPM mengukur pembangunan manusia jangka panjang dalam tiga dimensi dasar: Kehidupan yang panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak. Kehidupan yang panjang dan sehat diukur dengan harapan hidup. Tingkat pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sedangkan standar hidup layak diukur dengan *Gross National Income (GNI)* atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang dikonversikan menggunakan *Purchasing Power Parity (PPP)* atau Paritas Daya Beli (*UNDP: Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update*).

Di Indonesia, IPM sudah dihitung dan disajikan sampai level provinsi dan kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dapat dilakukan pengukuran dan perbandingan antar wilayah hingga level kabupaten/kota.

Tinggi atau rendahnya nilai IPM di suatu wilayah sangat ditentukan oleh banyak faktor seperti karakteristik sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan sebagainya. Akan tetapi perubahan atau peningkatan IPM bukan merupakan proses yang instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Perlu waktu yang cukup panjang untuk melihat seberapa besar perubahan capaian yang dihasilkan oleh proses pembangunan manusia, sehingga memerlukan penyajian indikator dalam bentuk data series yang cukup panjang.



BAB 2

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN PENGUKURANNYA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUKURANNYA

2.1. Konsep Dasar Pembangunan

Pembangunan manusia, menurut beberapa ahli sejatinya memiliki makna yang luas. Namun demikian, konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan ekonomi. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan ekonomi memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan, Meier dan Rouch (2000 dalam Arsyad, 2010) mengamati bagaimana strategi kebijakan pembangunan di awal dekade 1960-an fokus dilakukan. Kebijakan-kebijakan pembangunan kala itu lebih ditujukan pada maksimasi pertumbuhan PDB melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi.

Pada kenyataannya, strategi pembangunan konvensional tersebut justru mengarahkan pada 2 pilihan. Pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan dan pemerataan merupakan 2 kutub strategi pembangunan yang dalam prakteknya sering saling mengabaikan. Pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengorbankan aspek pemerataan, begitu pun sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan pun mulai berubah. Menurut Korten (1987), pembangunan adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat anggota masyarakat yang bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara bersinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri. Hal tersebut didukung UNDP dalam *Human*

Development Report (HDR)-nya yang pertama (1990), yang menyatakan bahwa:

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan (ekonomi) suatu negara, seperti dirangkum oleh Todaro dan Smith (2003 dalam Arsyad, 2010) dapat ditunjukkan dari 3 nilai pokok. Ketiga nilai pokok tersebut adalah: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

2.2. Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Sejalan konsep tersebut, UNDP dalam *Human Development Report 2016* lebih memaknai pembangunan manusia sebagai segala sesuatu yang terkait dengan manusia, kebebasannya dalam memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuannya.

Menurut *Human Development Report 2016*, pembangunan manusia adalah segala sesuatu yang terkait dengan kebebasan manusia, yaitu kebebasan untuk merealisasikan potensi dari setiap sisi kehidupan manusia secara utuh. Tidak hanya di sebagian tempat, namun di setiap sudut di seluruh penjuru dunia.

Beberapa ahli juga mengemukakan konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989 dalam BPS, 2016) misalnya, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan tersebut bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir.

Mahbub ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Oleh karena itu, pembangunan yang berawal dan bertitik tolak dari manusia serta dilakukan oleh manusia, sudah semestinya ditujukan juga untuk manusia (Arsyad, 2010; Daniela & Oana, 2015).

Kata Kunci Definisi Pembangunan Manusia:

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama. Keempat komponen tersebut adalah:

1. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

UNDP menyatakan bahwa konsep pembangunan manusia pada dasarnya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya terangkum dalam suatu indeks komposit, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diumumkan secara resmi oleh UNDP pada 1990. Pada awal diumumkan, dari ketiga

dimensi ini diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Sampai dengan 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. Pada 2010, UNDP melakukan penyempurnaan dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama, namun menggunakan indikator dan metode agregasi yang berbeda. Kemudian, tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metodologi Baru).

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.



Gambar 2.1. Perkembangan Penghitungan IPM

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.4. Metodologi Pengukuran IPM

Lebih dari 25 tahun IPM digunakan UNDP sebagai pengukuran pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM mulai dihitung sejak 1996. Mulai saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun.

Sejak 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka *backcasting* dari tahun 2010.

Terdapat beberapa indikator dan metode penghitungan yang berubah dalam penghitungan IPM metode baru. Indikator dan metode dimaksud, yaitu:

1. Indikator angka melek huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (HLS).
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan PNB per kapita, karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penghitungan IPM di Indonesia menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Variabel-variabel berikut merupakan variabel dalam Penghitungan IPM Metode Baru:

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan (Sensus Penduduk 2010, Proyeksi Penduduk).

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan setahun diperoleh dari susenas modul. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Perhitungan Paritas Daya Beli (PPP) dilakukan sesuai rumus:

$$PPP_j \equiv \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

keterangan:

P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

P_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Penghitungan IPM dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X_1 , Pengetahuan = X_2 dan Standar Hidup Layak = X_3)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

keterangan:

X_i : Indikator komponen pembangunan manusia ke- i , $i = 1, 2, 3$

X_{\min} : Nilai minimum X_i

X_{\max} : Nilai Maksimum X_i

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut adalah nilai maksimum dan nilai minimum indikator komponen IPM:

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
(1)	(2)	(3)
Angka Harapan Hidup	85	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0
Rata-rata Lama Sekolah	15	0
Konsumsi Perkapita yang Disesuaikan	26.572.352*	1.007.436**

Sumber: BPS

* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

** Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

2. **Tahap kedua** perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks X_i dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

keterangan:

$I_{kesehatan}$: Indeks Angka Harapan Hidup

$I_{pendidikan}$: $\frac{1}{2}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah + Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$I_{pengeluaran}$: Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan

3. **Tahap ketiga** adalah menghitung pertumbuhan IPM, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam satu tahun.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

keterangan:

- IPM_t : IPM pada tahun t
IPM_{t-1} : IPM pada tahun t-1

2.5. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,00–100,0. Adapun kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Tinggi : IPM antara 70,0 – 79,9
3. Sedang : IPM antara 60,0 – 69,9
4. Rendah : IPM kurang dari 60,0

BAB 3

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN WONOSOBO

<https://wonosobokab.bps.go.id>

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN WONOSOBO

3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal tersebut bisa diartikan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi jarak yang harus ditempuh.

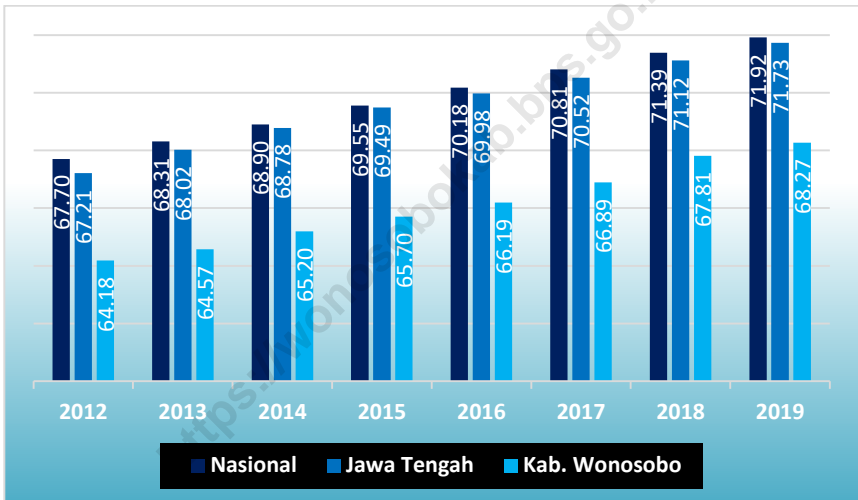
IPM pun menjadi salah satu indikator penting yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, terutama dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut, IPM seringkali dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan indikator target pembangunan pemerintah pada pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dan DAU memiliki hubungan timbal balik. Daerah dengan IPM tinggi maka kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) cenderung lebih tinggi, sedangkan daerah yang nilai IPM-nya rendah, kebutuhan fiskalnya jadi terhitung lebih rendah. Dengan kata lain, untuk mengejar akselerasi kemajuan pembangunan maka dibutuhkan IPM yang tinggi.

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2012-2019, IPM Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 64,18 menjadi 68,27. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Pertumbuhan ini melampaui laju pertumbuhan

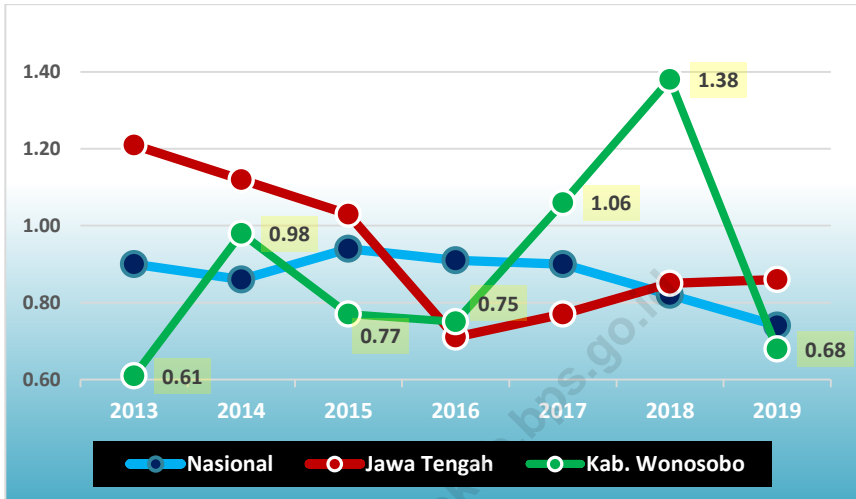
IPM pada tingkat nasional (0,87 persen) namun masih lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi (0,93 persen).

Meskipun selama kurun waktu tersebut IPM Kabupaten Wonosobo menunjukkan pertumbuhan yang bagus, namun status pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo berstatus “sedang” dan belum berubah sejak 2010.



Gambar 3.1. IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2012-2019

Nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 sebesar 68,27, naik 0,68 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 67,81. Angka ini sejalan dengan komponen pembentuk IPM yang juga mengalami kenaikan.



Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Nasional, 2013-2019

Laju pertumbuhan IPM adalah angka yang menunjukkan nilai pertumbuhan IPM dari tahun ke tahun. Dilihat dari gambar diatas, pertumbuhan IPM di Kabupaten Wonosobo sangat berfluktuatif dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Jika dilihat laju pertumbuhan dari tahun ke tahun, ada perlambatan pertumbuhan yang terjadi sejak tahun 2014 hingga 2016 dimana pertumbuhannya melambat dari 0,98 persen di tahun 2014 menjadi 0,75 persen di tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan IPM mengalami percepatan, dengan pertumbuhan 1,06 dan 1,38 persen dibanding tahun sebelumnya meskipun pada tahun 2019 pertumbuhannya kembali melambat sebesar 0,68 persen. Dalam memperhatikan angka IPM sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan, memperhatikan laju pertumbuhan merupakan hal yang juga penting dilakukan. Peringkat dalam angka IPM bukan hal yang mutlak sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan IPM-lah yang menentukan bagaimana suatu daerah membangun. Pertumbuhan nilai IPM yang tinggi menunjukkan performa pemerintah yang bagus dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, jika dilihat menurut keterbandingan antarwilayah se-Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-31. Posisi tersebut menunjukkan dari sisi peringkat Kabupaten Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu. Posisi Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kebumen dimana masing-masing berada di peringkat 27 dan 26 dengan nilai IPM 69,56 dan 69,60. Diperlukan usaha lebih dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bisa mengejar ketertinggalan dari kedua daerah tersebut.

Tabel 3.1. Nilai Komponen IPM Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019

Kode Wilayah	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Penge- luaran per kapita per tahun Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Peringkat	
							Jawa Tengah	eks- Karesi- denan Kedu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDONESIA	71,34	12,95	8,34	11 299	71,92		
3300	JAWA TENGAH	74,23	12,68	7,53	11 102	71,73		
3305	Kebumen	73,22	13,04	7,53	9 066	69,60	26	4
3306	Purworejo	74,52	13,49	7,91	10 342	72,50	14	2
3307	Wonosobo	71,60	11,74	6,76	10 871	68,27	31	6
3308	Magelang	73,56	12,53	7,77	9 387	69,87	23	3
3323	Temanggung	75,48	12,13	7,15	9 489	69,56	27	5
3371	Kota Magelang	76,75	13,81	10,33	12 514	78,80	4	1

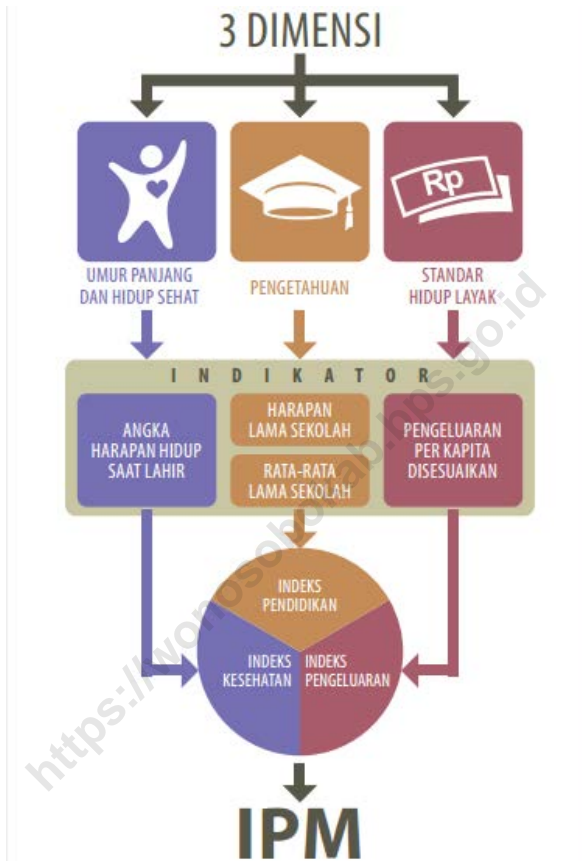
Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai IPM suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia, sejatinya dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan

kesehatan (Arsyad, 2010). Dengan demikian, besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia.

3.2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa IPM disusun oleh 3 dimensi dasar, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat**, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup ketika lahir (E_0); **pengetahuan**, yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan **standar hidup**, yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita (*PPP - Purchasing Power Parity*/ paritas daya beli dalam satuan rupiah). Pada bahasan kali ini akan diuraikan capaian dari masing-masing indikator IPM Kabupaten Wonosobo per dimensi.

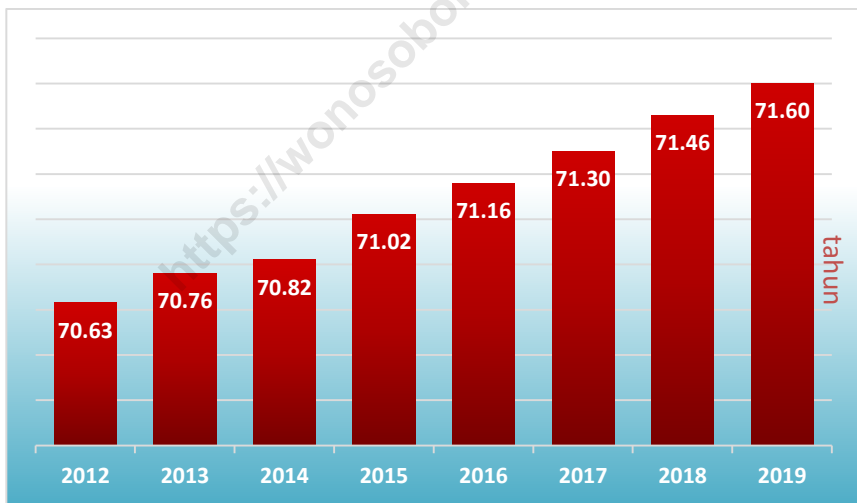


Gambar 3.3. Komponen Penghitungan IPM

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses). Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak

lahir. Angka ini diharapkan mampu mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang, tidak terlepas dari kesehatan seseorang. Akan tetapi usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membahas usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan.

Sejalan dengan capaian IPM di Kabupaten Wonosobo, Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat ini pun terus memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2019, Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,97 poin. Pada 2012, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Wonosobo sebesar 70,63 tahun, kemudian tahun 2019 telah mencapai 71,60 tahun.

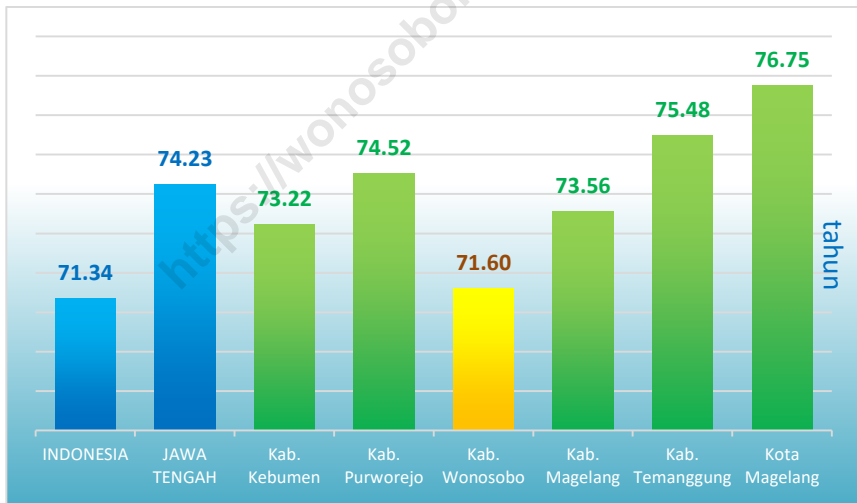


Gambar 3.4. Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2012-2019

Capaian AHH Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir berada di kisaran 71, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wonosobo akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 71 tahun. Sementara itu,

tren AHH yang terus meningkat menunjukkan peluang bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat disebabkan beberapa hal. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat, diduga turut memiliki andil dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat tersebut. Selain itu, faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.



Gambar 3.5. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019

Selama 2019, berdasarkan keterbandingan secara kewilayahan se-eks Karesidenan Kedu, AHH Kabupaten Wonosobo menempati posisi ke-6. Bila

dibandingkan dengan Jawa Tengah, Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo tahun 2019 ternyata masih terpaud cukup banyak, yaitu 2,63 poin. Angka Harapan Hidup Jawa Tengah pada 2019 mencapai 74,23 tahun. Ketertinggalan ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan, terutama pembangunan di bidang kesehatan.

3.3. Dimensi Pengetahuan

Terdapat 2 indikator dalam Dimensi Pengetahuan. Indikator tersebut adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berikut adalah capaian dari masing-masing indikator.

3.3.1. Harapan Lama Sekolah

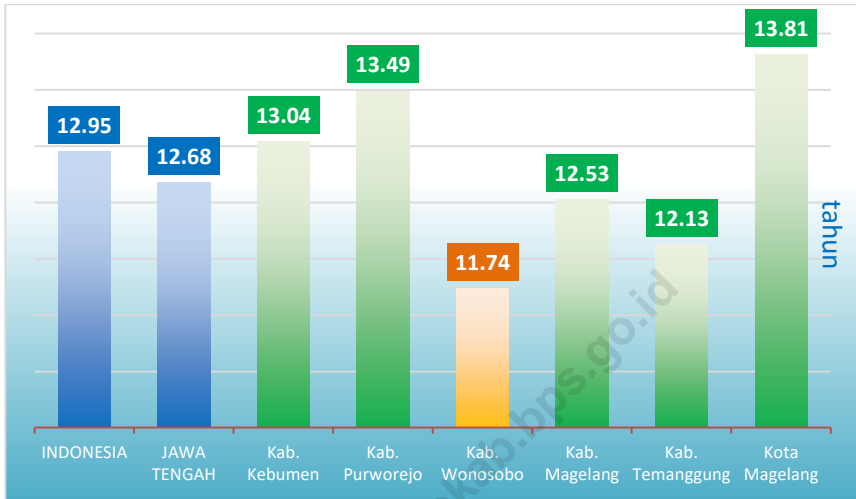
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren didapatkan dari Direktorat Pendidikan Islam.



Gambar 3.6. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2012-2019

Selama kurun waktu 2012-2019, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren yang terus meningkat. Sampai dengan 2019, HLS Kabupaten Wonosobo mencapai 11,74 tahun. Angka ini meningkat 0,91 poin jika dibandingkan kondisi 2012 dan hanya meningkat 0,05 poin dari 2018. Capaian sebesar 11,74 tahun tersebut dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berumur 7 tahun di masa mendatang adalah 11 tahun 9 bulan (setara kelas XII SMA).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-eks Karesidenan Kedu, HLS Kabupaten Wonosobo masih berada di peringkat paling bawah. Di tingkat eks Karesidenan Kedu, HLS Kabupaten Temanggung berada satu tingkat di atas Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 12,13 tahun.



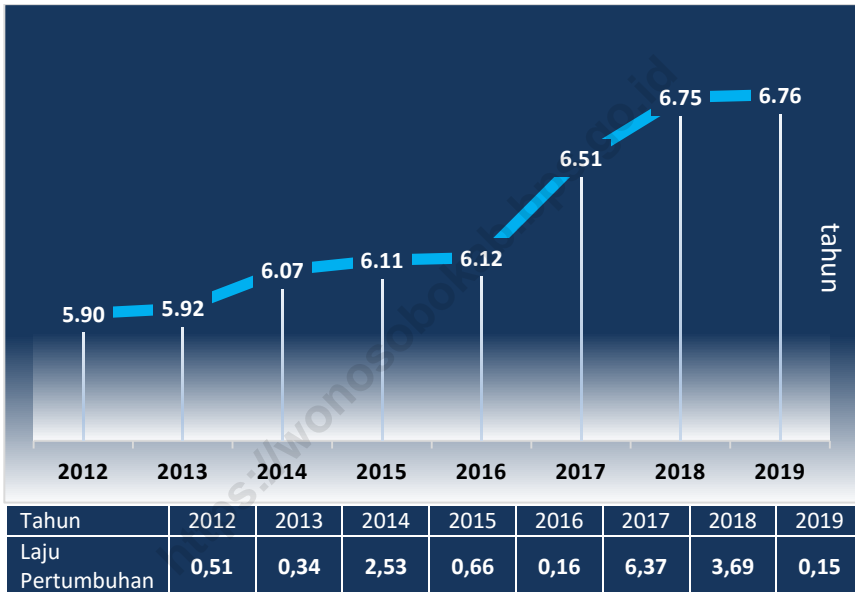
Gambar 3.7. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019

3.3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia pada Dimensi Pengetahuan, selain Harapan Lama Sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum tepat untuk menanyakan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. pada Tahun 2012 rata-rata lama

sekolah sebesar 5,90 tahun. Nilai ini berarti bahwa penduduk umur 25 tahun ke atas mempunyai rata-rata lama sekolah 5,90 tahun atau setara dengan kelas enam di Sekolah Dasar (SD). Nilai ini terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah sudah mencapai 6,76 tahun atau setara dengan kelas satu di Sekolah Menengah Pertama (SMP).



Gambar 3.8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2012-2019

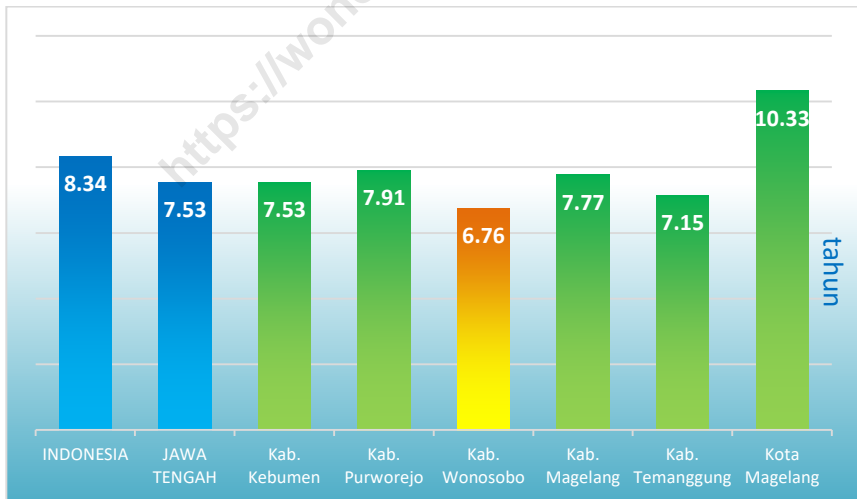
Sepanjang periode 2012-2019, tren Rata-rata Lama Sekolah terus mengalami peningkatan. Selama periode itu pula, indikator ini tumbuh sebesar 14,58 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 1,80 persen per tahun.

Di sisi lain, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan tingkat kemampuan baca tulis yang tinggi. Tingkat kemampuan baca tulis di Kabupaten Wonosobo untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sudah di atas 90 persen. Akan tetapi, capaian tersebut ternyata belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih

panjang. Kondisi ini seharusnya menyadarkan kita, terutama para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus mengusung isu strategis bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2019 berada pada urutan ke enam. Dengan capaian sebesar 6,76 tersebut, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo masih di bawah capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Capaian masing-masing indikator pada Dimensi Pengetahuan di Kabupaten Wonosobo memiliki trend yang sama dengan capaian provinsi maupun nasional, sama-sama mengalami peningkatan capaian. Namun patut disayangkan, meskipun capaian pada dimensi ini terus meningkat, besarnya masih di bawah angka provinsi maupun nasional.



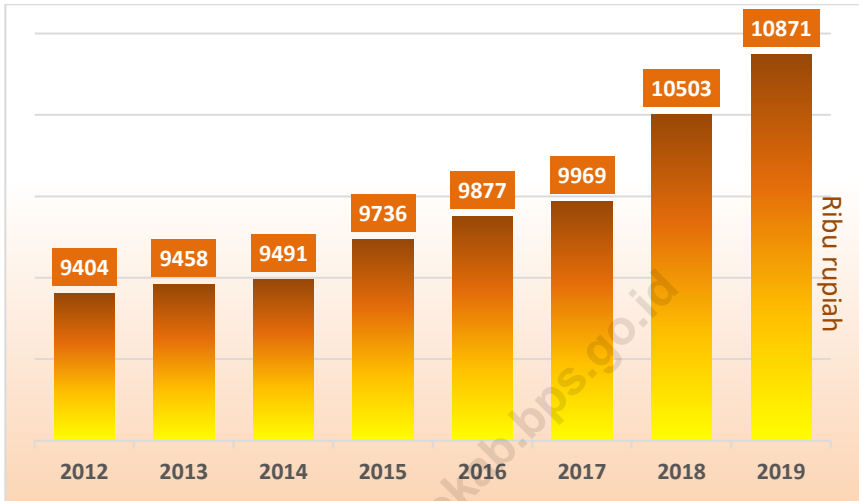
Gambar 3.9. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019

3.4. Dimensi Standar Hidup Layak

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

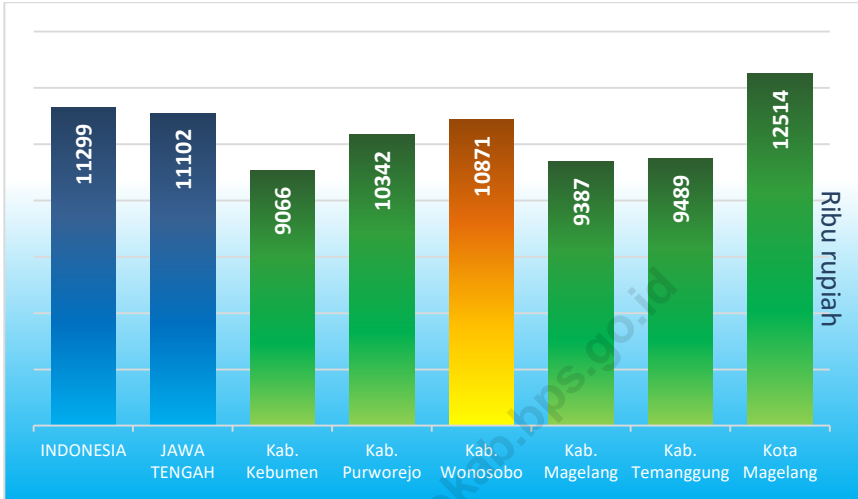
Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. Alasan lainnya adalah karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti indeks *Purchasing Power Parity (PPP)* yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat, didapatkan bahwa metode terakhir adalah yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.



Gambar 3.10. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan per Tahun di Kabupaten Wonosobo, 2012-2019

Selama kurun waktu 2012-2019, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo terus mengalami kenaikan. Selama periode itu pula, indikator ini tumbuh sebesar 15,60 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 2,11 persen per tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 ini sebesar 10,87 juta rupiah per tahun, naik sebesar 3,50 persen dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Wonosobo berada pada urutan kedua namun masih tertinggal dengan capaian Jawa Tengah yang sebesar 11,10 juta rupiah per tahun.



Gambar 3.11. Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun untuk Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, dan Nasional, 2019

BAB 4

CAPAIAN DAN TANTANGAN

<https://wonosobokab.bps.go.id>

CAPAIAN DAN TANTANGAN

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Dengan kata lain, tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Pembangunan manusia yang masih terus bergulir di Indonesia hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Hal-hal yang mendasar dalam peningkatan kualitas manusia semakin meningkat. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang agar kualitas manusia Indonesia terus meningkat (BPS, 2016).

4.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Berpedoman pada Pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa kecuali. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Berdasarkan hal itu pula, dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Selanjutnya, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”, termasuk segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar.

Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, peningkatan kapabilitas dasar penduduk, utamanya di bidang pendidikan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih fokus, dengan berbagai macam upaya. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka merealisasikan hal itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pun menyusun program dan target-target pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Pembangunan manusia yang semakin meningkat dengan pemerataan pendidikan yang layak, peningkatan mutu pendidikan, serta kemudahan akses

terhadap pendidikan menjadi isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo pada periode tersebut.

Partisipasi Pendidikan Cukup Tinggi

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Kualitas sumber daya manusia dapat juga dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui capaian program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi sekolah (APS)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.

$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18, 19-24 tahun)

Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menjadi indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

$$APM_{SD/MI} = \frac{\text{Jumlah penduduk SD/MI usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

Catatan:

Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs usia 13-15 tahun,

SMA/SMK/MA usia 16-18 tahun, dan Perguruan Tinggi usia 19-24 tahun

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Pemerintah berharap agar kedua indikator, APS dan APM, selalu meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu sebagai indikator yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 Tahun 2019 dari hasil Susenas Maret Tahun 2019 sebesar 99,55 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa sebanyak 99,55 persen penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 99,23 persen. Untuk usia 13-15 tahun, APS Kabupaten Wonosobo sebesar 94,61 persen di Tahun 2019 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2018 yang sebesar 94,06 persen. Tingginya APS pada kedua kelompok umur, 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dalam bersekolah bisa jadi sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, APS untuk kelompok umur 16-18 tahun juga naik sebesar 2,18 poin, dari 57,04 persen di Tahun 2018 menjadi 59,22 persen di Tahun 2019. Walaupun belum sebesar APS 7-15 tahun, namun hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, sampai dengan pendidikan menengah ke atas semakin dapat dinikmati dan dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi masih butuh kerja ekstra dari pemangku kebijakan terutama pada akses terhadap pendidikan menengah atas.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

Tabel 4.1. APS menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
7-12	99,23	99,55
13-15	94,06	94,61
16-18	57,04	59,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, APM untuk jenjang pendidikan SD tahun 2019 mencapai 98,20 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 98,20 persen penduduk Kabupaten Wonosobo kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. Dibandingkan kondisi 2018, APM Kabupaten Wonosobo 2019

untuk jenjang pendidikan tersebut mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,55 poin, dari yang semula 97,65 persen.

Meskipun sudah ditetapkan peraturan terkait batas usia masuk SD/ sederajat, namun beberapa orang tua murid terkesan mengharapkan putra/putri mereka yang berusia kurang dari 7 tahun untuk dapat bersekolah di SD/ sederajat, dengan alasan sudah mahir baca tulis. Alhasil, anak usia 6 tahun pun bisa bersekolah di SD/ sederajat, dengan syarat tertentu. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan besaran nilai APM SD/ sederajat di Kabupaten Wonosobo. Kendati demikian, jika disandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, yaitu target 94,8 persen APM SD/ sederajat pada 2019, maka capaian APM untuk Kabupaten Wonosobo sebesar 98,20 persen tersebut sudah melampaui target.

Tabel 4.2. APM menurut Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Paket A	97,65	98,20
SMP/MTs/Paket B	72,18	76,50
SMA/SMK/Paket C	44,71	44,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sama seperti APM SD/ sederajat, APM Kabupaten Wonosobo 2019 untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat juga mengalami kenaikan jika dibandingkan kondisi 2018. Tercatat APM SMP/ sederajat naik cukup signifikan sebesar 4,32 poin dari 72,18 persen di Tahun 2018 menjadi 76,50 persen di Tahun 2019. Berbeda dengan APM SMA/ sederajat yang justru mengalami

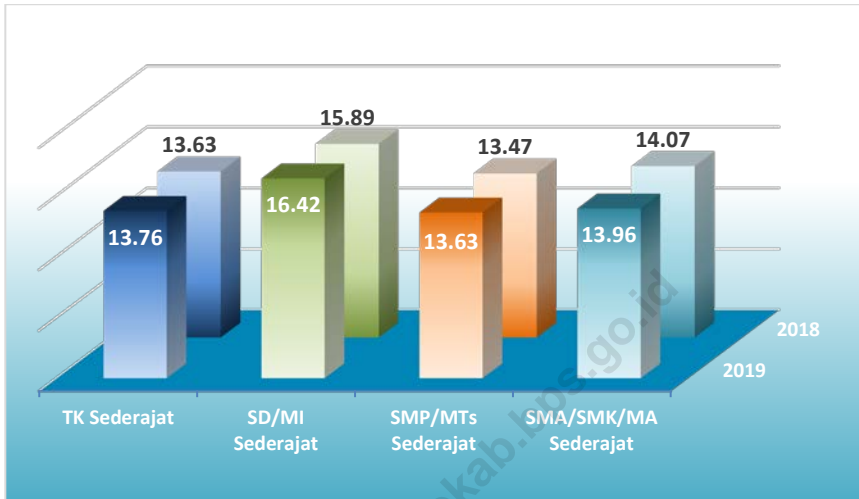
penurunan 0,05 poin dari 44,71 persen di Tahun 2018 menjadi 44,66 persen di Tahun 2019.

Tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anggota rumah tangga. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya akan semakin mahal. Hal ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pembangunan pendidikan yang sudah dirancang maupun yang sebagian sudah dilaksanakan, demi mengejar ketertinggalan.

Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas. Namun, karena ketersediaan data, dalam bab ini hanya dibahas mengenai rasio murid guru dan rasio guru sekolah.

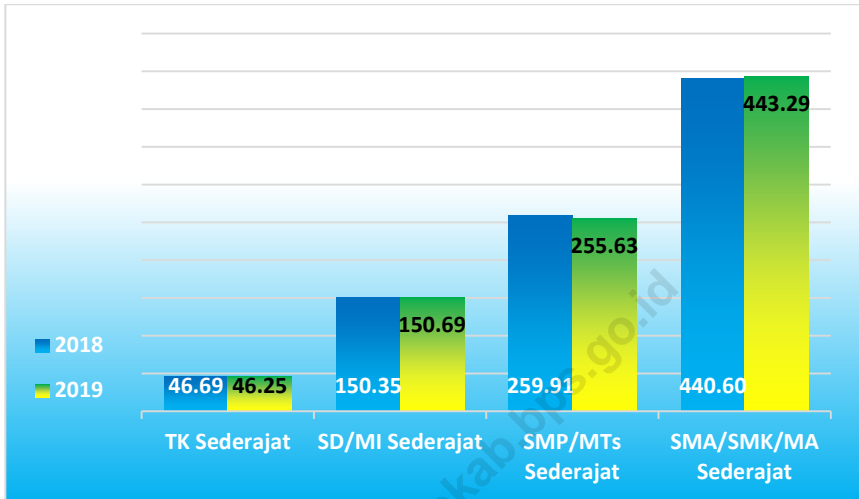
Rasio murid guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar.



Gambar 4.1. Rasio Murid Guru Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran pun cenderung semakin rendah.

Selama 2 tahun terakhir, rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Wonosobo relatif stabil. Pada 2019, rasio SD/MI adalah 16,42, artinya setiap 1 orang guru mengampu 16 murid SD/MI. Rasio murid guru SMP/MTs sebesar 13,63 dan SMA/SMK/MA Sederajat 13,96. Penurunan rasio murid guru SMA/SMK/MA lebih disebabkan peningkatan jumlah guru lebih signifikan dibanding peningkatan jumlah murid. Peningkatan rasio murid guru dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena beban guru bertambah.

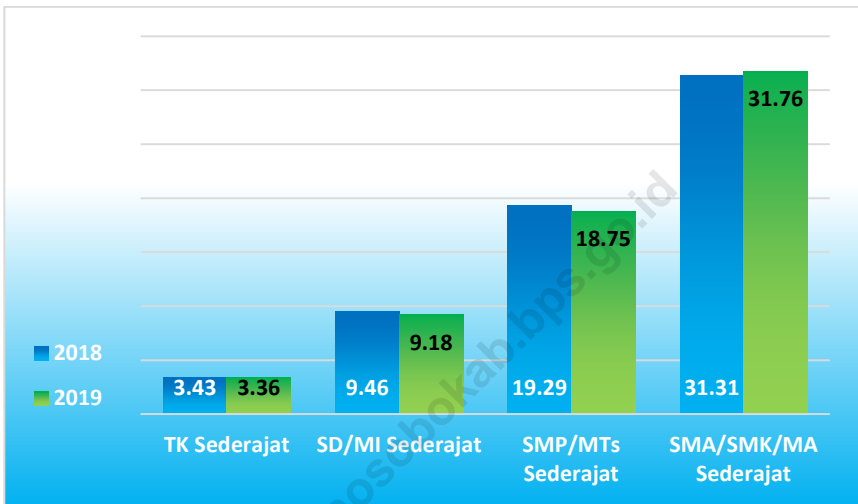


Gambar 4.2. Rasio Murid Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Rasio murid sekolah menunjukkan rata-rata tingkat kepadatan yang dimiliki oleh satu sekolah. Tingkat kepadatan sekolah mempengaruhi murid untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan suasana yang nyaman. Kenaikan rasio murid sekolah yang cukup signifikan terjadi di jenjang SMA/SMK/MA sederajat, dimana pada Tahun 2018 rasio murid sekolah sebesar 440,60 menjadi 443,29 pada tahun 2019. Meskipun ini menunjukkan hal positif dimana ada kenaikan jumlah murid di jenjang tersebut, perlu diperhatikan juga kebutuhan akan penambahan jumlah sekolah ke depannya.

Tidak jauh berbeda dengan rasio murid guru, rasio guru sekolah juga relatif stabil, meskipun untuk jenjang pendidikan SD/MI sederajat rasionya mengalami sedikit penurunan, yang semula 9,46 pada 2018 menjadi 9,18 pada 2019. Begitu juga pada jenjang SMP/MTs sederajat rasio juga mengalami penurunan yaitu dari 19,29 menjadi 18,75. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru pada jenjang tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari sisi infrastruktur sudah memadai tetapi perlu dilakukan

penambahan tenaga pengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan semakin efektif.



Gambar 4.3. Rasio Guru Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

4.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Kualitas Rumah Tinggal di Kabupaten Wonosobo Setahun Terakhir

Kualitas lingkungan rumah tinggal tentunya berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan menurut Kepmen (1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

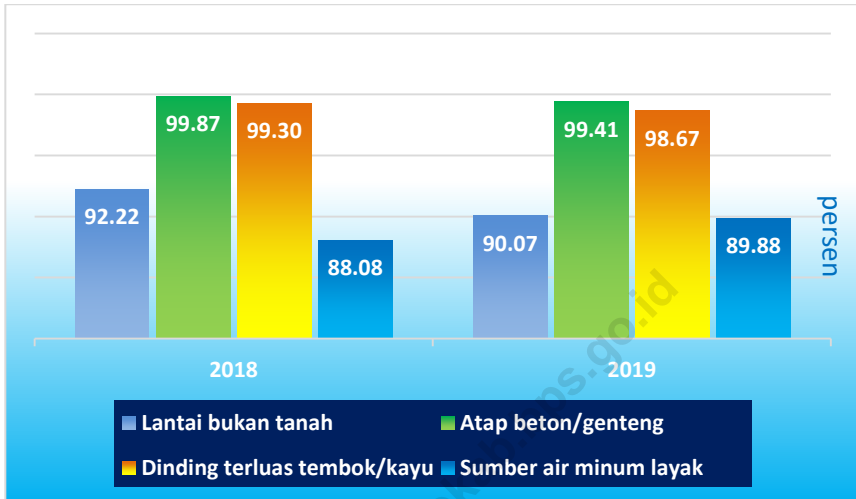
Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta

merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Secara umum perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah seringkali menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

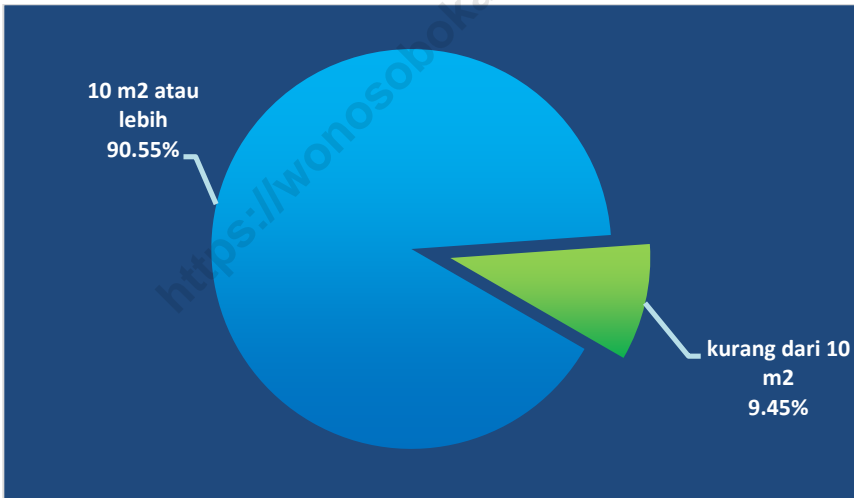


Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonorejo, 2018-2019

Berdasarkan data Susenas, jika dibandingkan dengan kondisi 2018, persentase rumah tangga di Kabupaten Wonorejo yang bertempat tinggal di rumah dengan lantai bukan tanah pada 2019 menunjukkan adanya penurunan 2,15 poin, yang semula 92,22 persen menjadi 90,07 persen. Tidak berbeda dengan tren penurunan untuk persentase lantai bukan tanah, rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah dengan dinding terluas tembok atau kayu pada 2019 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2018. Penurunan tersebut sebesar 0,63 poin, dari semula 99,30 persen menjadi 98,67 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tempat tinggal penduduk Kabupaten Wonorejo dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap terluas. Dari hasil Susenas 2018 dan 2019 diperoleh bahwa di atas 95 persen rumah tinggal di Kabupaten Wonorejo sudah memenuhi kriteria atap yang layak, yaitu atap terluasnya terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, ataupun asbes.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perumahan adalah luas lantai perkapita. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai rumah perkapita adalah rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga. Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Organization (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).



Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Wonosobo, 2019

Menurut hasil Susenas 2019, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 10 meter persegi ke atas. Hal ini memberi indikasi positif, karena sedikit jumlah rumah tangga dengan luas lantai per kapita yang sempit. Secara

umum, dapat dikatakan bahwa pada 2019, berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh WHO dan APHA terdapat 90,55 persen rumah tangga di Kabupaten Wonosobo tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita yang ideal.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal dapat ditentukan dari kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

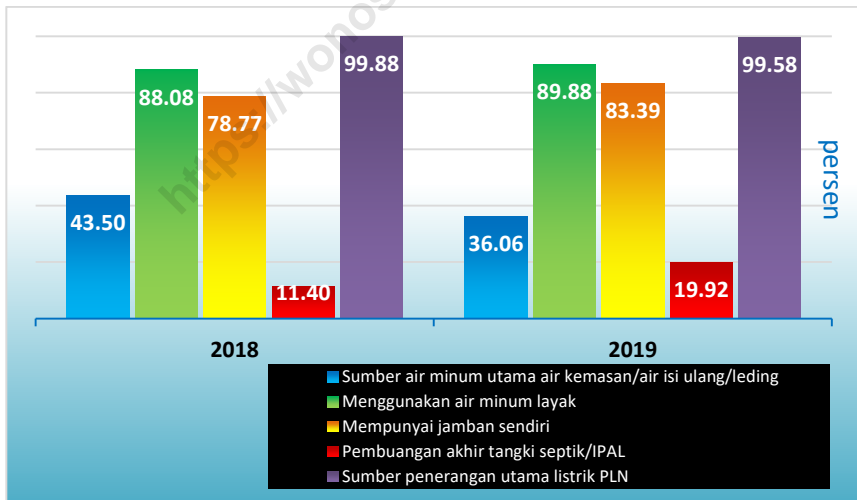
Pada 2019, rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mencapai 36,06 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,50 persen. Namun demikian, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak meningkat sebesar 1,80 poin dari 88,08 persen menjadi 89,88 persen. Penggunaan air minum dari mata air terlindung diduga menjadi penyebab meningkatnya persentase penggunaan air minum yang layak.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya dalam menunjang kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya.

Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan

ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada 2019, persentase rumah tinggal dengan jamban sendiri sebanyak 83,39 persen, naik 4,62 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 78,77 persen. Begitu pula rumah tangga yang menggunakan pembuangan akhir tinja dengan tangka septik atau IPAL juga mengalami peningkatan, yaitu dari 11,40 persen menjadi 19,92 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Untuk saat ini listrik PLN merupakan sumber penerangan yang paling konsisten untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018 maupun 2019, kurang dari satu persen rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang belum merasakan aliran listrik PLN di rumahnya.



Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

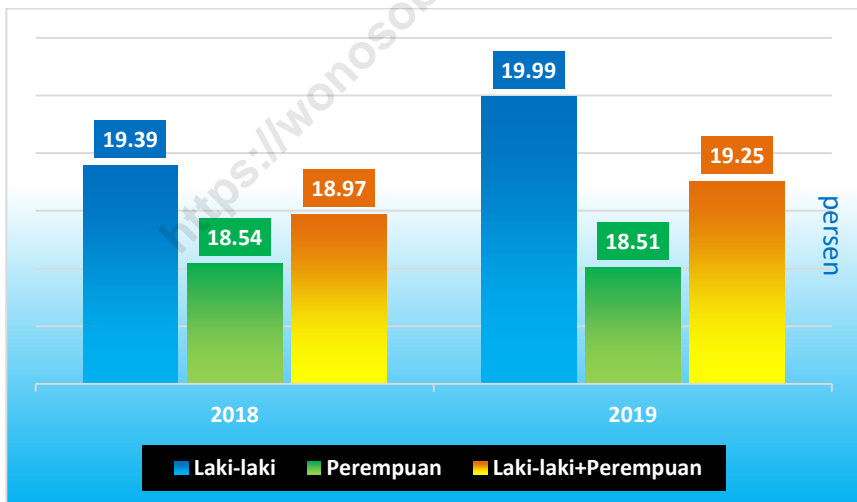
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor *emeritus* administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor determinan munculnya masalah kesehatan, yaitu: faktor perilaku/gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 1997).

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pencegahan, yang dapat dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Sementara itu, tiga faktor lain masih dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti: semakin memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk

berperilaku hidup sehat di kalangan masyarakat luas, serta memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan beberapa penyakit lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Gambar 4.7. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2019 menunjukkan angka kesakitan penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo meningkat 0,60 poin

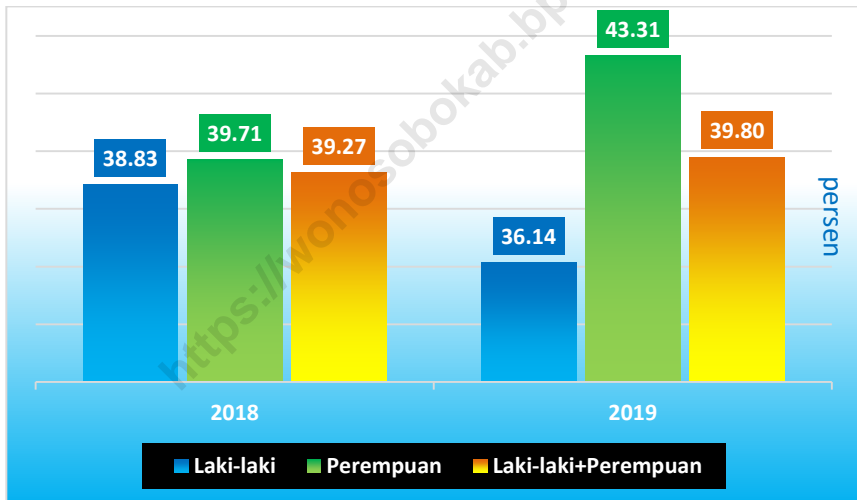
dibandingkan 2018, yaitu dari 19,39 persen menjadi 19,99 persen. Sedangkan angka kesakitan penduduk perempuan menurun tipis sebesar 0,03 poin dari 18,54 persen menjadi 18,51 persen. Sejalan dengan keadaan kesakitan penduduk laki-laki dan perempuan, kondisi total penduduk juga menunjukkan peningkatan dari 18,97 persen menjadi 19,25 persen atau naik sebesar 0,28 poin. Naiknya angka kesakitan ini diduga dikarenakan pada tahun 2019 terjadi anomali cuaca yang mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh penduduk. Disamping keadaan penyakit dan jenis penyakit yang diderita juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada saat kondisi penyakit menular atau penyakit karena kurangnya sarana dan kualitas kebersihan juga menjadi faktor penentu derajat kesehatan di suatu daerah.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk, jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk (kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya) serta jenis pelayanan kesehatan.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Susenas 2019, terdapat 39,80 persen penduduk Kabupaten Wonosobo yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin dibanding Tahun 2018 dimana penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan

berobat jalan sebesar 39,27 persen. Meningkatnya nilai ini menunjukkan tingkat kesakitan yang dialami penduduk cukup mengganggu sehingga memerlukan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Sedangkan sisanya, yaitu 60,20 persen penduduk memutuskan untuk tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat selain berobat jalan tersebut, misalnya dengan mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Dilihat dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan justru mengalami penurunan yaitu dari 38,83 persen di Tahun 2018 menjadi 36,14 persen di Tahun 2019. Sedangkan untuk penduduk perempuan naik dari 39,71 persen menjadi 43,31 persen.



Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS per Januari 2014, pada dasarnya diharapkan mampu membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan melakukan pembayaran

premi yang terjangkau. Di sisi lain, rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya seringkali memberikan stigma bahwa berobat itu mahal, walaupun beberapa biaya pengobatan sudah dicukupi oleh BPJS.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Wonosobo, 2018-2019

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	5,54	6,33
RS Swasta	4,63	7,46
Praktik Dokter/Bidan	43,41	47,88
Klinik/Praktek Dokter Bersama	5,92	5,25
Puskesmas/Pustu	36,33	32,71
UKBM*	3,92	4,44
Praktik Tradisional/alternatif	2,73	2,34
Lainnya	2,72	0,00

*) UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

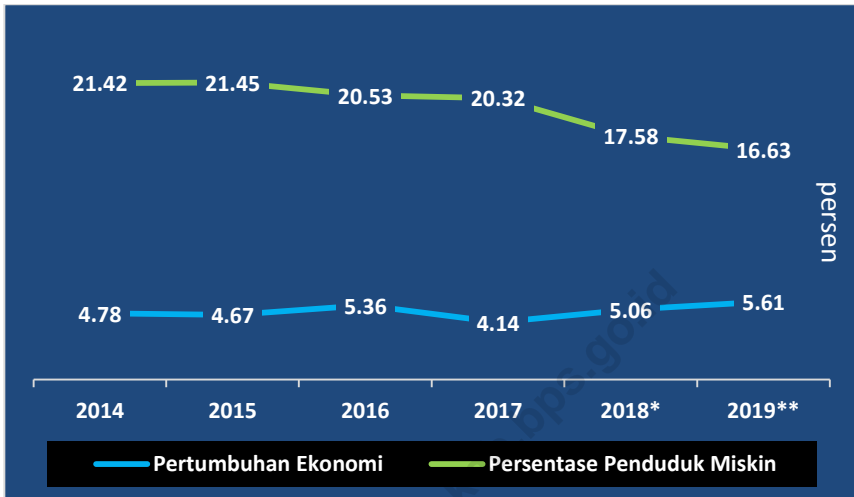
Sumber: Susenas

Preferensi pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dipilih penduduk yang mengalami keluhan kesehatan untuk berobat di Tahun 2018 dan Tahun 2019 menunjukkan perubahan. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke rumah sakit pemerintah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 sebanyak 6,33 persen penduduk yang sakit berobat jalan ke rumah sakit pemerintah, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,54 persen. Begitu pula untuk rumah sakit swasta sebanyak 7,46 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 4,63 persen. Perubahan signifikan juga terjadi di preferensi berobat jalan di praktek dokter atau praktek bidan dan puskesmas/pustu. Sebagai pilihan utama masyarakat untuk tempat berobat, terjadi peningkatan persentase

berobat jalan di praktek dokter atau praktek bidan dimana nilainya naik dari 43,41 persen menjadi 47,88 persen. Sebaliknya preferensi berobat jalan di puskesmas/pustu menurun dari 36,33 persen menjadi 32,71 persen. Bertambahnya praktek dokter/bidan yang menjadi fasilitas kesehatan pertama BPJS kemungkinan merupakan penyebab peningkatan preferensi berobat jalan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, disamping lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk pemanfaatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) masih belum banyak menjadi pilihan masyarakat untuk berobat. Hal ini bisa dilihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat ke UKBM seperti Poskesdes dan Posyandu tahun 2019 sebesar 4,44 persen.

4.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi. Hasilnya pun terlihat melalui pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir, yang sejalan dengan penurunan angka kemiskinan.



Gambar 4.9. Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo, 2014-2019

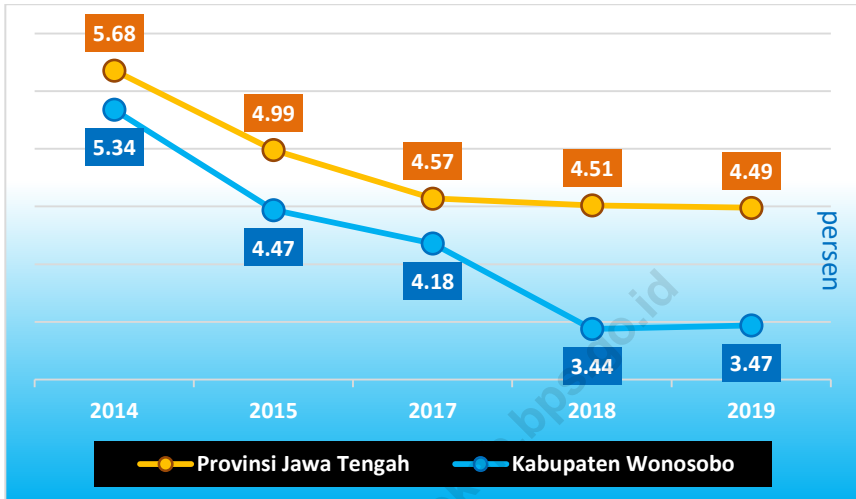
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sudah cukup bagus berkisar di atas 4 persen. Namun fluktuasi besarnya nilai pertumbuhan ekonomi tiap tahun menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sebesar 5,61 persen, nilai ini sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di Tahun 2018 yang sebesar 5,06 persen. Berdasarkan lapangan usaha, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 16,13 persen, kemudian diikuti oleh pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan 11,77 persen, jasa perusahaan 10,31 persen dan jasa lainnya dengan pertumbuhan 10,30 persen. Pertumbuhan keempat lapangan usaha yang tinggi tersebut tidak serta merta bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena keempat lapangan usaha itu bukan lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kabupaten Wonosobo. Lapangan usaha yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap perekonomian adalah pertanian dan industri pengolahan. Namun pertumbuhan kedua lapangan usaha tersebut lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan

ekonomi keseluruhan, bahkan untuk lapangan usaha pertanian mempunyai nilai pertumbuhan terendah yaitu 1,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi harus juga dibarengi dengan akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin. Terlihat bahwa selama dua tahun terakhir laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo cenderung semakin cepat. Dari Tahun 2014 hingga 2017, persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang sangat lambat, hanya sebesar 1,10 poin, yaitu dari 21,42 persen di tahun 2014 menjadi 20,32 persen di Tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu menjadi 17,58 persen pada 2018 dan 16,63 persen pada 2019.

Tantangan ke depan yang semakin berat tentu memerlukan kebijakan yang tepat. Evaluasi mengenai bagaimana kondisi dan potensi perekonomian Kabupaten Wonosobo akan sangat diperlukan untuk meningkatkan sasaran pembangunan dan lebih fokus lapangan usaha mana yang harus lebih digarap dengan serius. Pemahaman mengenai struktur dan fundamental ekonomi Kabupaten Wonosobo akan sangat menentukan arah kebijakan yang akan diambil.

Di sisi lain, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terlihat fluktuatif, namun memperlihatkan indikasi yang perlu untuk menjadi perhatian lebih serius. Hal ini dikarenakan sejak 2017 TPT Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 4,18 persen pada 2017 menjadi 3,44 persen pada 2018 namun meningkat lagi menjadi 3,47 persen pada 2019.



Gambar 4.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, 2014-2019

Pengangguran disini adalah penduduk yang tidak bekerja namun mempunyai keinginan untuk masuk ke dunia kerja, yaitu dengan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, bisa juga penduduk yang belum bekerja namun sudah diterima kerja dan sedang menunggu waktu mulai bekerja, atau juga penduduk yang tidak bekerja namun tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena sudah putus asa. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak masuk dalam klasifikasi di atas bukan masuk dalam kategori pengangguran, namun masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.

Mengapa angka pengangguran sedemikian penting? Jika ditelisik, terdapat banyak jawaban terkait pertanyaan tersebut. Salah satu jawabannya adalah karena indikator ini merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah terkait penciptaan atau penyediaan lapangan kerja, atau dengan kata lain menjadi hak bagi setiap penduduk yang termasuk dalam usia kerja (Kuncoro, 2015; 66). Namun yang lebih utama, indikator ini seringkali digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, selain angka

kemiskinan tentunya. Sehingga diperlukan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Sehingga diharapkan jika terjadi penurunan TPT di Kabupaten Wonosobo, mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

<https://wonosobokab.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Statistics of Wonosobo Regency

Jl. Mayjend Bambang Sugeng km 2,2 Wonosobo

Telp: (0286) 324270 Fax: (0286) 3325380

Homepage: <http://wonosobokab.bps.go.id> E-mail: bps3307@bps.go.id